



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

## **TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU**

**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB. I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB. II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun Lalu</b> .....	<b>4</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD .....	4
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD Sekretariat DPRD Provinsi Maluku .....	9
2.3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku .....	11
2.4. Perbandingan Evaluasi Dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Startejik Tahun Lalu Dan Tahun Ini .....	12
2.5. Evaluasi Kinerja Keuangan .....	13
<b>BAB. III. Tujuan dan Sasaran PD</b> .....	<b>22</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	22
3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	22
3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	23
3.4 Strategi Program Kegiatan danSub Kegiatan .....	23
3.5 Perjanjian Kinerja .....	27
3.6 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	28
3.7 Target Sekretariat DPRD Provinsi Maluku .....	28
<b>BAB. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan</b> .....	<b>29</b>
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	29
<b>BAB. V. Penutup</b> .....	<b>36</b>

## Daftar Tabel

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	5-8
Tabel. 2.2 REALISASI ( APBD ) .....	9
Tabel 2.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	10
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	11
Tabel 2.5. Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini dapat di jelaskan dalam tabel berikut ini .....	12
Tabel 2.6 Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2022 .....	13
Tabel 2.7 Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	14-17
Tabel T.C29 .....	18-21
Tabel 3.1. Ringkasan Visi, Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 .....	22
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran .....	23
Tabel 3.3. Strategi, Program dan Sub Kegiatan .....	24-26
Tabel 3.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	27
Tabel 3.5 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Perubahan Tahun 2022 .....	28
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Provinsi Maluku .....	32-35

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebagaimana tercantum Dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam melakukan Pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan **good governance**.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) unit kerja tahun 2024 harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggungjawab instansi/unit kerja dan memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Unit Kerja tahun lalu serta tujuan, sasaran, program/kegiatan tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Sekretariat DPRD Provinsi Maluku menyampaikan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2024 sebagai pelaksanaan visi dan misi sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku 2019-2024.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Inputan Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2029-2024.
10. Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1. Maksud.**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

#### **2. Tujuan.**

Untuk mengetahui Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan dalam program kerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Usulan Program dan Kegiatan
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- 2.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

### **Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.2 Program dan Kegiatan
- 3.3 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.**

### **Bab V. Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ( RENJA ) SKPD

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Pertanggung jawaban (*responsibility*) merupakan dimensi formal maupun moral yang melekat dan diemban oleh setiap instansi penyelenggara pemerintah. Salah satu wujud pertanggungjawaban itu adalah perhitungan (*accountability*) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi atau satuan kerja pemerintahan.

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui system pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability System*) ini, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat dilakukan analisis berbagai upaya yang harus dilakukan guna memecahkan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui sistem pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability System*) akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan khususnya selama tahun 2022. Selain itu melalui sistem pertanggungjawaban kinerja ini pula seluruh *stakholder* akan dapat mengetahui capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauh mana penyimpangan maupun kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Untuk memudahkan para *stakeholders* (khususnya Gubernur Maluku dan Instansi Penilai Akuntabilitas) mengetahui informasi kinerja dan keuangan, maka secara sistematis pertanggungjawaban (*accountability*) kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 2.1

## Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		KEU (Rp)	%
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.330.849.760,-</b>	<b>33.169.238.250,-</b>	<b>96.62</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.330.849.760,-	33.169.238.250,-	96.62
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.121.518.159</b>	<b>5.552.586.896</b>	<b>90.71</b>
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	393.812.100	353.949.500	89.88
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	588.894.900	581.707.000	98.78
Penyediaan peralatan rumah tangga	1.746.456.000	1.746.456.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.214.018.359,-	1.198.051.231,-	98.68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	714.945.800,-	679.848.850,-	95.09
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.232.331.000,-	956.182.333,-	77.59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.060.000,-	36.392.000,-	15.75
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>9.474.271.500,-</b>	<b>9.071.793.300,-</b>	<b>95.75</b>
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.204.453.400,-	1.838.438.000,-	83.40
Pengadaan Mebel	2.997.820.390,-	2.986.122.000,-	99.61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	4.271.997.710,-	4.247.233.300,-	99.42
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.649.196.890,-</b>	<b>7.365.275.698,-</b>	<b>85.16</b>
Penyediaan Jasa Surat-menyurat	85.000.000,-	51.600.000,-	60.71
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.820.500.000,-	2.249.139.530,-	79.74

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.345.000,-	454.725.000,-	88.41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.229.351.890,-	4.609.811.168,-	88.15
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.968.000.600,-</b>	<b>5.856.685.222,-</b>	<b>73.50</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	1.704.970.000,-	1.575.582.118,-	92.41
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.047.022.600,-	3.060.004.045,-	75.61
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.216.008.000,-	1.221.099.059,-	55.10
<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>1.822.851.100,-</b>	<b>1.677.638.356,-</b>	<b>92.03</b>
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.307.455.100,-	1.298.585.000,-	99.32
Pelaksanaan Medical Check Up	515.396.000,-	379.053.356,-	73.55
<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.795.456.000,-</b>	<b>1.769.654.000,-</b>	<b>98.57</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.795.456.000,-	1.769.654.000,-	98.57
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>45.904.772.364,-</b>	<b>36.039.106.303,-</b>	<b>78.51</b>
<b>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>5.127.688.900,-</b>	<b>2.831.267.570,-</b>	<b>55.20</b>
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.315.124.000,-	1.190.916.350,-	90.56
Pembahasan Rancangan Perda	3.812.564.900,-	1.640.351.220,-	43.02
<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>3.558.901.288,-</b>	<b>2.608.643.402,-</b>	<b>73.30</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	249.828.211,-	174.876.320,-	70.00
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	834.547.350,-	579.806.000,-	69.48
Pembahasan APBD	1.118.496.000,-	549.518.000,-	49.13
Pembahasan Perubahan APBD	221.062.500,-	197.548.600,-	89.36

Pembahasan Laporan Semester	41.011.227,-	38.250.000,-	93.27
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.093.956.000,-	1.068.644.482,-	97.69
<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>6.554.874.340,-</b>	<b>5.777.366.000,-</b>	<b>88.14</b>
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	436.304.820,-	284.271.000,-	65.15
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	445.251.000,-	316.513.000,-	71.09
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	415.807.730,-	282.271.000,-	67.88
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang SDA	405.808.950,-	273.426.000,-	67.38
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	252.142.840,-	142.170.000,-	56.38
Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.599.559.000,-	4.478.715.000,-	97.37
<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>10.228.231.218</b>	<b>8.742.398.917</b>	<b>85.47</b>
Orientasi DPRD	862.862.000,-	803.956.000,-	93.17
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.542.350.000,-	4.317.924.000,-	95.06
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.312.141.000,-	1.246.431.000,-	94.99
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.989.697.850,-	1.609.962.517,-	80.91
Penyelenggaran Hubungan Masyarakat	972.534.368,-	763.729.400,-	78.53
Penyusunan Program Kerja DPRD	548.646.000,-	396.000,-	0.07
<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>12.877.838.460,-</b>	<b>8.256.335.000,-</b>	<b>64.11</b>
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6.031.860.000,-	4.014.325.000,-	66.55
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	162.808.460,-	50.350.000,-	30.93
Pelaksanaan Reses	6.683.170.000,-	4.191.660.000,-	62.72

<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>221.906.600,-</b>	<b>19.396.500</b>	<b>8.74</b>
Penyusunan Kode Etik DPRD	133.164.350,-	19.146.500,-	14.38
Pengawasan Kode Etik DPRD	88.742.250,-	250.000,-	0.28
<b>Kegiatan Fasilitas dan Tugas DPRD</b>	<b>7.335.331.558,-</b>	<b>7.803.698.914</b>	<b>96.50</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.291.587.000,-	7.035.875.000,-	86.50
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	43.744.558,-	21.350.000,-	48.81
<b>Jumlah</b>	<b>116.086.916.373,-</b>	<b>100.571.272.025,-</b>	<b>86.65,-</b>

Terkait sub kegiatan yang realisasinya dibawah 70% disebabkan karena realisasinya sangat situasional, hal ini mengingat pada Tahun 2021 adanya pandemic Covid 19, sehingga sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Dari semua kegiatan yang realisasinya kurang dari 70% rata-rata dalam kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan pengumpulan massa, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya peraturan pembatasan social yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada bagian ini akan dilaporkan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, yang menggambarkan anggaran dan realisasinya dalam rangka membiayai tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, ditambah akuntabilitas Anggaran DPRD.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 yang totalnya sebagai berikut :

**Tabel. 2.2**  
**REALISASI ( APBD )**

ANGGARAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	34.947.890.760,-	33.169.238.250,-	94.91
Belanja Langsung (BL)	81.119.025.613,-	67.402.033.775,-	83.10
Jumlah	116.066.916.373,-	100.571.272.025,-	86.64

Pada bagian ini dilaporkan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, yang menggambarkan anggaran dan realisasinya dalam rangka membiayai tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, ditambah akuntabilitas Anggaran DPRD.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2021, dapat lihat table diatas

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku**

Salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran kinerja yang merupakan hal yang penting dalam manajemen program/kegiatan secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feedback*), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dalam mencapai keberhasilan di masa mendatang. Artinya bahwa melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka program/kegiatan instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dapat dilakukan secara lebih objektif.

Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Bersandar pada penegasan dimaksud, maka diketahui bahwa komponen strategis pengukuran kinerja adalah pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja kegiatan maupun sasaran dalam setahun.

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel. 2.3**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**

**Capaian Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.	Tingkat capaian pelayanan kepada anggota DPRD	85%	94,43%	94,43%
2.	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan DPRD	Capaian kegiatan – kegiatan DPRD yang terfasilitasi	85%	91,65%	91,65%

**2.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik**

**Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dapat dijelaskan sebagai berikut :**

1. Sasaran-1: Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan indikator Tingkat capaian pelayanan kepada anggota DPRD yang ditargetkan 85 %, realisasinya 94,43% melebihi target yang ditetapkan dengan demikian prosentase capaian sebesar 94,43% artinya memiliki penilaian sangat baik.
2. Sasaran-2: Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan DPRD dengan indikator Capaian kegiatan – kegiatan DPRD yang terfasilitasi ditargetkan 85%, realisasinya 91,65% melebihi target yang ditetapkan dengan demikian prosentase capaian sebesar 91,65% artinya memiliki penilaian sangat baik.

## 2.4 Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini.

Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**

Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini dapat di jelaskan dalam tabel berikut ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	Tingkat Capaian Pelayanan Kepada Anggota DPRD	80%	76.23%	76.23%	85%	94,43%	94,43%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan – Kegiatan DPRD	Capaian Kegiatan – Kegiatan DPRD Yang Terfasilitasi	80%	95.75%	95.75%	85%	91,65%	91,65%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini adalah pada tahun ini yaitu tahun 2022 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik lebih baik dibandingkan dengan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik pada tahun lalu yaitu tahun 2021. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

1. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota DPRD Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan fungsi sebesar 94,43% artinya kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target ini diperoleh melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD serta komunikasi intensif dan efektif dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Maluku.

2. Sasaran Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan DPRD sebesar 91,65% artinya kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, hal ini diperoleh salah satunya adalah lewat terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku untuk memenuhi tantangan global penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif lewat pemanfaatan informasi teknologi, maka Sekretariat DPRD Provinsi Maluku membuat sebuah inovasi sarana pelayanan publik yang diberi nama **Si-PAPARISA (Sistem Informasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat)** yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat Provinsi Maluku.

## 2.5 Evaluasi Kinerja Keuangan.

Pada bagian table dibawa ini akan dilaporkan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, yang menggambarkan anggaran dan realisasinya dalam rangka membiayai tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, ditambah akuntabilitas Anggaran DPRD.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2022 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2022 yang totalnya sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

### **Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2022**

<b>ANGGARAN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (%)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung (BTL)</b>	<b>34.282.181.200,-</b>	<b>33.773.777.612,-</b>	<b>98,66</b>
<b>Belanja Langsung (BL)</b>	<b>85.154.470.173,-</b>	<b>77.833.981.835,-</b>	<b>91,40</b>
<b>Jumlah</b>	<b>119.436.651.373,-</b>	<b>111.607.759.447,-</b>	<b>93,45</b>

Berikut daftar rekapitulasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 :

**Tabel 2.7**

Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI MALUKU</b>	<b>64.413.144.221</b>	<b>60.822.934.583</b>	<b>94,43</b>
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.232.181.200	33.773.777.612	98,7
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.232.181.200	33.773.777.612	98,7
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>6.791.020.607</b>	<b>5.890.079.786</b>	<b>86,73</b>
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434.080.500	411.581.500	94,82
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.256.300.000	1.745.963.550	77,38
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.367.838.107	1.355.835.000	99,12
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	890.217.000	825.140.290	92,69
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	1.700.325.000	1.413.573.446	83,14
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.260.000	137.986.000	97,00
➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>3.389.279.360</b>	<b>3.361.551.200</b>	<b>99,18</b>
1. Pengadaan Meubel	1.590.972.100	1.584.636.000	99,60
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bagunan lainnya	1.798.307.260	1.776.915.200	98,81
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>9.792.716.054</b>	<b>8.353.614.757</b>	<b>85,30</b>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.157.500	60.827.500	44,35
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.825.300.000	2.591.074.814	91,71
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	780.396.000	397.198.000	50,90
4. Penyediaan Jasa Pelayanan	6.049.862.554	5.304.514.443	

umum Kantor			87,68
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.834.453.000	7.133.639.000	96,62
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>7.133.639.000</b>	<b>6.742.501.016</b>	<b>94,52</b>
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan lainnya	1.748.170.000	1.706.642.407	97,62
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan lainnya	4.290.550.000	3.991.452.732	93,03
➤ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<b>1.403.852.000</b>	<b>1.273.184.862</b>	<b>90,69</b>
1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	993.456.000	986.124.000	99,26
2. Pelaksanaan Medical Check Up	410.396.000	287.060.862	69,95
➤ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	<b>1.670.456.000</b>	<b>1.428.225.350</b>	<b>85,50</b>
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	<b>1.670.456.000</b>	<b>1.428.225.350</b>	<b>85,50</b>
<b>DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>55.023.542.152</b>	<b>50.426.581.364</b>	<b>91,65</b>
➤ Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	<b>5.920.114.000</b>	<b>5.469.950.801</b>	<b>92,40</b>
1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.603.178.000	1.578.162.900	98,44
2. Pembahasan Rancangan Perda	4.316.936.000	3.891.787.901	90,15
➤ Pembahasan Kebijakan Anggaran	<b>3.799.723.440</b>	<b>3.333.219.881</b>	<b>87,72</b>
1. Pembahasan KUA dan PPAS	491.823.040	347.114.900	70,58
2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	184.762.350	180.219.500	97,54
3. Pembahasan APBD	1.419.575.000	1.113.885.200	78,47
4. Pembahasan Perubahan APBD	52.762.500	49.348.200	93,53
5. Pembahasan Laporan Semester	60.444.550	52.810.250	87,37
6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.590.356.000	1.589.841.831	99,97
➤ Pengawasan Penyelenggaraan	<b>7.008.613.430</b>	<b>6.074.437.733</b>	<b>86,67</b>

Pemerintahan			
1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	362.567.000	318.991.000	87,98
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	362.968.000	362.968.000	100
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	374.595.640	315.726.400	84,28
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	335.091.950	257.088.600	76,72
5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	298.297.840	-	-
6. Pengawasan Pengguna Anggaran	5.275.093.000	4.819.663.733	91,37
➤ Peningkatan Kapasitas DPRD	<b>10.635.530.760</b>	<b>9.287.006.177</b>	<b>87,32</b>
1. Orientasi DPRD	955.518.000	816.716.000	85,47
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5.128.774.000	4.323.918.000	84,31
3. Penyediaan Kelompak Pakar dan Tim ahli	1.290.741.000	1.003.527.000	77,75
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.945.918.050	1.896.105.314	97,44
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	855.166.710	787.326.863	92,07
6. Penyusunan Program Kerja DPRD	459.413.000	459.413.000	100
➤ Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<b>19.876.836.810</b>	<b>18.580.570.315</b>	<b>93,48</b>
1. Kunjungan Kerja Dalam daerah	5.908.700.000	5.307.076.560	89,82
2. Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	162.842.810	99.843.755	61,31
3. Pelaksanaan Reses	13.805.294.000	13.173.650.000	95,42
➤ Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	<b>413.818.154</b>	<b>324.839.554</b>	<b>78,50</b>
1. Penyusunan Kode Etik DPRD	333.095.904	324.839.554	97,52
2. Pengawasan Kode Etik DPRD	80.722.250	-	-

➤ Fasilitas dan Tugas DPRD	<b>7.368.905.558</b>	<b>7.356.556.903</b>	<b>99,83</b>
1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.325.161.000	7.315.487.903	99,87
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	43.744.558	41.069.000	93,88
<b>Jumlah</b>	<b>119.436.651.373,-</b>	<b>111.607.759.447,-</b>	<b>93,45</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
5	4	02	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.007.434.786	6.155.940.222	7.133.639.000	267.911.572	1.008.180.808	879.398.592	4.589.010.044	6.744.501.016	94,55%	12.900.441.238	26,87%									
		02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6	10.758.573.821	1 thn	1.575.582.118	1 thn	1.748.170.000	3 bln	164.696.572	3 bln	499.748.147	3 bln	587.959.592	3 bln	454.238.096	12 bln	1.706.642.407	12 bln	97,62%	3.282.224.525	30,51%	Set-DPRD
		09			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		30	25.537.218.484	5 unit	3.359.259.045	5 unit	4.290.550.000		-		-		-	5 unit	3.993.452.732	5 unit	3.993.452.732	5 unit	93,08%	7.352.711.777	28,79%	Set-DPRD
		11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		456	11.711.642.481	76 unit	1.221.099.059	76 unit	1.094.919.000	19 unit	103.215.000,00	19 unit	508.432.661	19 unit	291.439.000	19 unit	141.319.216	76 unit	1.044.405.877	76 unit	95,39%	2.265.504.936	19,34%	Set-DPRD
6	4	02	01	1.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			11.502.418.297		1.677.638.356		1.403.852.000		-		-		100.787.506		1.172.397.356		1.273.184.862	0	90,69%	2.950.823.218	25,65%	
		02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		1104	8.250.205.113	-	1.298.585.000	184 psg	993.456.000		-		-		-	184 psg	986.124.000	184 psg	986.124.000	84 ps	99,26%	2.284.709.000	27,69%	Set-DPRD
		03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		810	3.252.213.185	135 org	379.053.356	135 org	410.396.000		-	67 org	100.787.506	67 org	186.273.356	67 org	186.273.356	67 org	287.060.862	67 org	69,95%	666.114.218	20,48%	Set-DPRD
7	4	02	01	1.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD			10.540.786.167		1.787.451.000		1.670.456.000		-	-	423.127.850		-		1.005.097.500		1.428.225.350	0	85,50%	3.215.676.350	30,51%	
		04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		6	10.540.786.167	1 thn	1.787.451.000	1 thn	1.670.456.000		-	3 bln	423.127.850		-	3 bln	1.005.097.500	12 bln	1.428.225.350	12 bln	85,50%	3.215.676.350	30,51%	Set-DPRD
2	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI DPRD																						
1	4	02	02	1.01	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			41.491.412.300		3.287.381.570		5.920.114.000		-	-	569.800.400		1.538.812.456		3.361.337.945		5.469.950.801		92,40%	8.757.332.371	21,11%	
		01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		72	8.298.596.831	12 buah	1.190.916.350	12 buah	1.603.178.000	3 bln	-	3 bln	479.800.400		-	3 bln	1.098.362.500	12 bln	1.578.162.900	12 bln	98,44%	2.769.079.250	33,37%	Set-DPRD
		02			Pembahasan Rancangan Perda		48	33.192.815.470	4 dok	2.096.465.220	8 dok	4.316.936.000		-	2 dok	90.000.000	2 dok	1.538.812.456	4 dok	2.262.975.445	8 dok	3.891.787.901	8 dok	90,15%	5.988.253.121	18,04%	Set-DPRD
2	4	02	02	1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			23.879.590.848		3.159.510.602		3.799.723.440		290.133.585		1.027.213.280		829.039.775		1.186.833.241		3.333.219.881		87,72%	6.492.730.483	27,19%	
		01			Pembahasan KUA dan PPAS		6	298.646.927	1 thn	200.009.320	1 thn	491.823.040		-		-	3 bln	68.614.500	3 bln	278.500.400	12 bln	347.114.900	12 bln	70,58%	547.124.220	183,20%	Set-DPRD
		02			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		6	3.109.928.384	1 thn	580.631.000	1 thn	184.762.350		-	3 bln	51.450.000	3 bln	84.940.500	3 bln	43.829.000	12 bln	180.219.500	12 bln	97,54%	760.850.500	24,47%	Set-DPRD
		03			Pembahasan APBD		6	11.914.298.456	1 thn	1.047.027.200	1 thn	1.419.575.000		-	3 bln	183.456.000	3 bln	596.455.800	3 bln	333.973.400	12 bln	1.113.885.200	12 bln	78,47%	2.160.912.400	18,14%	Set-DPRD
		04			Pembahasan Perubahan APBD		6	1.394.932.008	1 thn	197.548.600	1 thn	52.762.500		-		-	3 bln	21.795.200	3 bln	27.553.000	12 bln	49.348.200	12 bln	93,53%	246.896.800	17,70%	Set-DPRD
		05			Pembahasan Laporan Semester		6	258.785.969	1 thn	40.450.000	1 thn	60.444.550	3 bln	600.000	3 bln	6.450.000	3 bln	41.610.250	3 bln	4.150.000	12 bln	52.810.250	12 bln	87,37%	93.260.250	36,04%	Set-DPRD
		06			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		6	6.902.999.105	1 thn	1.093.844.482	1 thn	1.590.356.000	3 bln	289.533.585	3 bln	785.857.280	3 bln	15.623.525	3 bln	498.827.441	12 bln	1.589.841.831	12 bln	99,97%	2.683.686.313	38,88%	Set-DPRD
								135.421.642.399		16.067.921.750		19.927.784.440		558.045.157		3.028.322.338		3.348.038.329		11.314.676.086		18.249.081.910			34.317.003.660		

1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	4	02	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48.007.434.786	6.155.940.222	7.133.639.000	267.911.572	1.008.180.808	879.398.592	4.589.010.044	6.744.501.016	94,55%	12.900.441.238	26,87%												
		02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	10.758.573.821	1 thn	1.575.582.118	1 thn	1.748.170.000	3 bln	164.696.572	3 bln	499.748.147	3 bln	587.959.592	3 bln	454.238.096	12 bln	1.706.642.407	12 bln	97,62%		3.282.224.525	30,51%	Set-DPRD		
		09			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30	25.537.218.484	5 unit	3.359.259.045	5 unit	4.290.550.000	-	-	-	5 unit	3.993.452.732	5 unit	3.993.452.732	5 unit	93,08%		7.352.711.777	28,79%	Set-DPRD					
		11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456	11.711.642.481	76 unit	1.221.099.059	76 unit	1.094.919.000	19 unit	103.215.000,00	19 unit	508.432.661	19 unit	291.439.000	19 unit	141.319.216	76 unit	1.044.405.877	76 unit	95,39%		2.265.504.936	19,34%	Set-DPRD		
6	4	02	01	1.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		11.502.418.297	1.677.638.356	1.403.852.000	-	-	100.787.506	1.172.397.356	1.273.184.862	0	90,69%	2.950.823.218	25,65%											
		02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1104	8.250.205.113	-	1.298.585.000	184 psg	993.456.000	-	-	-	184 psg	986.124.000	184 psg	986.124.000	84 psg	99,26%		2.284.709.000	27,69%	Set-DPRD					
		03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	810	3.252.213.185	135 org	379.053.356	135 org	410.396.000	-	67 org	100.787.506	67 org	186.273.356	67 org	287.060.862	67 org	69,95%		666.114.218	20,48%	Set-DPRD					
7	4	02	01	1.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		10.540.786.167	1.787.451.000	1.670.456.000	-	-	423.127.850	-	1.005.097.500	1.428.225.350	0	85,50%	3.215.676.350	30,51%										
		04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	6	10.540.786.167	1 thn	1.787.451.000	1 thn	1.670.456.000	-	3 bln	423.127.850	-	3 bln	1.005.097.500	12 bln	1.428.225.350	12 bln	85,50%		3.215.676.350	30,51%	Set-DPRD				
2	4	02	02		PROGRAM DUJONGAN PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI DPRD																								
1	4	02	02	1.01	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		41.491.412.300	3.287.381.570	5.920.114.000	-	-	569.800.400	1.538.812.456	3.361.337.945	5.469.950.801	92,40%	8.757.332.371	21,11%											
		01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	72	8.298.596.831	12 buah	1.190.916.350	12 buah	1.603.178.000	3 bln	-	3 bln	479.800.400	-	3 bln	1.098.362.500	12 bln	1.578.162.900	12 bln	98,44%		2.769.079.250	33,37%	Set-DPRD			
		02			Pembahasan Rancangan Perda	48	33.192.815.470	4 dok	2.096.465.220	8 dok	4.316.936.000	-	2 dok	90.000.000	2 dok	1.538.812.456	4 dok	2.262.975.445	8 dok	3.891.787.901	8 dok	90,15%		5.988.253.121	18,04%	Set-DPRD			
2	4	02	02	1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		23.879.590.848	3.159.510.602	3.799.723.440	290.133.585	1.027.213.280	829.039.775	1.186.833.241	3.333.219.881	87,72%	6.492.730.483	27,19%												
		01			Pembahasan KUA dan PPAS	6	298.646.927	1 thn	200.009.320	1 thn	491.823.040	-	-	3 bln	68.614.500	3 bln	278.500.400	12 bln	347.114.900	12 bln	70,58%		547.124.220	183,20%	Set-DPRD				
		02			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	3.109.928.384	1 thn	580.631.000	1 thn	184.762.350	-	3 bln	51.450.000	3 bln	84.940.500	3 bln	43.829.000	12 bln	180.219.500	12 bln	97,54%		760.850.500	24,47%	Set-DPRD			
		03			Pembahasan APBD	6	11.914.298.456	1 thn	1.047.027.200	1 thn	1.419.575.000	-	3 bln	183.456.000	3 bln	596.455.800	3 bln	333.973.400	12 bln	1.113.885.200	12 bln	78,47%		2.160.912.400	18,14%	Set-DPRD			
		04			Pembahasan Perubahan APBD	6	1.394.932.008	1 thn	197.548.600	1 thn	52.762.500	-	-	3 bln	21.795.200	3 bln	27.553.000	12 bln	49.348.200	12 bln	93,53%		246.896.800	17,70%	Set-DPRD				
		05			Pembahasan Laporan Semester	6	258.785.969	1 thn	40.450.000	1 thn	60.444.550	3 bln	600.000	3 bln	6.450.000	3 bln	41.610.250	3 bln	4.150.000	12 bln	52.810.250	12 bln	87,37%		93.260.250	36,04%	Set-DPRD		
		06			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	6.902.999.105	1 thn	1.093.844.482	1 thn	1.590.356.000	3 bln	289.533.585	3 bln	785.857.280	3 bln	15.623.525	3 bln	498.827.441	12 bln	1.589.841.831	12 bln	99,97%		2.683.686.313	38,88%	Set-DPRD		
							135.421.642.399	16.067.921.750	19.927.784.440	558.045.157	3.028.322.338	3.348.038.329	11.314.676.086	18.249.081.910		34.317.003.660													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
3	02	02	1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		41.362.076.445	5.739.124.000	7.008.614.430	1.967.020.000	2.864.729.733	127.529.400	1.042.437.600	6.001.716.733	85,63%	11.740.840.733	28,39%										
	01			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	2.753.137.952	1 thn	246.029.000	1 thn	362.567.000	-	3 bln	12.086.000	-	3 bln	306.905.000	12 bln	318.991.000	12 bln	87,98%	565.020.000	20,52%	Set-DPRD		
	02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	2.809.589.466	1 thn	316.513.000	1 thn	362.968.000	-	-	3 bln	127.529.400	3 bln	188.197.000	12 bln	315.726.400	12 bln	86,98%	632.239.400	22,50%	Set-DPRD		
	03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	2.623.798.752	1 thn	282.271.000	1 thn	374.595.640	-	-	-	1 thn	290.247.000	1 thn	290.247.000	1 thn	77,48%	572.518.000	21,82%	Set-DPRD			
	05			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SDA	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	2.560.705.201	1 thn	273.426.000	1 thn	335.092.950	-	-	-	1 thn	257.088.600	1 thn	257.088.600	1 thn	76,72%	530.514.600	20,72%	Set-DPRD			
	06			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terselenggaranya pengawasan tindak lanjut BPK	6	1.591.052.838	1 thn	142.170.000	1 thn	298.297.840	-	-	-	1 thn	-	-	-	0	0,00%	142.170.000	8,94%	Set-DPRD			
	07			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	6	29.023.792.235	1 thn	4.478.715.000	1 thn	5.275.093.000	3 bln	1.967.020.000	3 bln	2.852.643.733	-	3 bln	-	12 bln	4.819.663.733	12 bln	91,37%	9.298.378.733	32,04%	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		64.732.235.694	9.225.892.117	10.635.530.760	1.749.826.000	2.266.885.300	1.940.973.675	3.329.321.202	9.287.006.177	87,32%	18.512.898.294	28,60%										
	01			Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD	6	5.444.767.078	1 thn	796.107.000	1 thn	955.518.000	3 bln	816.716.000	3 bln	-	-	-	12 bln	816.716.000	12 bln	85,47%	1.612.823.000	29,62%	Set-DPRD		
	03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhiya kebutuhan publikasi dan dokumentasi DPRD	6	27.439.894.069	1 thn	4.317.924.000	1 thn	5.128.774.000	3 bln	477.960.000	3 bln	1.587.550.000	3 bln	395.215.500	3 bln	1.863.192.500	12 bln	4.323.918.000	12 bln	84,31%	8.641.842.000	31,49%	Set-DPRD
	04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	6	8.279.773.728	1 thn	1.244.212.000	1 thn	1.290.741.000	3 bln	175.000.000	3 bln	303.000.000	3 bln	207.527.000	3 bln	318.000.000	12 bln	1.003.527.000	12 bln	77,75%	2.247.739.000	27,15%	Set-DPRD
	05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tim ahli fraksi	6	12.555.242.146	1 thn	1.609.806.517	1 thn	1.945.918.050	3 bln	280.150.000	3 bln	376.335.300	3 bln	467.635.600	3 bln	771.984.414	12 bln	1.896.105.314	12 bln	97,44%	3.505.911.831	27,92%	Set-DPRD
	06			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan masyarakat	6	6.136.813.429	1 thn	763.054.400	1 thn	855.166.710	-	-	3 bln	411.182.575	3 bln	376.144.288	12 bln	787.326.863	12 bln	92,07%	1.550.381.263	25,26%	Set-DPRD		
	07			Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	6	4.875.745.246	1 thn	494.788.200	1 thn	459.413.000	-	-	3 bln	459.413.000	3 bln	-	12 bln	459.413.000	12 bln	100,00%	954.201.200	19,57%	Set-DPRD		
5	02	02	1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		81.745.072.506	10.942.095.000	19.876.836.810	552.880.000	5.736.871.650	5.359.646.505	6.931.172.160	18.580.570.315	93,48%	29.522.665.315	36,12%										
	01			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	6	38.061.790.583	1 thn	4.602.745.000	1 thn	5.908.700.000	3 bln	552.880.000	3 bln	1.599.315.000	3 bln	1.046.879.400	3 bln	2.108.002.160	12 bln	5.307.076.560	12 bln	89,82%	9.909.821.560	26,04%	Set-DPRD
	02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tercapainya pokok-pokok pikiran DPRD	6	1.027.341.734	1 thn	52.350.000	1 thn	162.842.810	3 bln	-	3 bln	50.596.650	3 bln	40.947.105	3 bln	8.300.000	12 bln	99.843.755	12 bln	61,31%	152.193.755	14,81%	Set-DPRD
	03			Pelaksanaan Reses	Terserapnya aspirasi masyarakat	6	42.655.940.190	1 thn	6.287.000.000	1 thn	13.805.294.000	-	-	3 bln	4.086.960.000	3 bln	4.271.820.000	3 bln	4.814.870.000	12 bln	13.173.650.000	12 bln	95,42%	19.460.650.000	45,62%	Set-DPRD
6	02	02	1.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		1.400.258.384	19.396.500	413.782.154	-	-	107.585.000	217.254.554	324.839.554	0	78,50%	344.236.054	24,58%									
	01			Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi badan kehormatan	6	840.283.694	1 thn	19.146.500	1 thn	333.059.904	-	-	-	3 bln	107.585.000	3 bln	217.254.554	12 bln	324.839.554	12 bln	97,53%	343.986.054	40,94%	Set-DPRD	
	02			Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi badan kehormatan	6	559.974.690	1 thn	250.000	1 thn	80.722.250	-	-	-	3 bln	-	-	-	12 bln	-	12 bln	0,00%	250.000	0,04%	Set-DPRD	
7	02	02	1.08	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD		51.209.072.054	7.248.970.914	7.368.905.558	2.065.849.539	1.990.304.737	2.479.409.091	820.993.536	7.356.556.903	99,83%	14.605.527.817	28,52%										
	01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	540	50.933.038.425	90 fr	7.227.820.914	90 fr	7.325.161.000	22 fr	2.065.849.539	22 fr	1.990.304.737	22 fr	2.439.790.091	24 fr	819.543.536	90 fr	7.315.487.903	90 fr	99,87%	14.543.308.817	28,55%	Set-DPRD
	02			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya laporan kinerja DPRD	6	276.033.629	1 thn	21.150.000	1 thn	43.744.558	3 bln	-	-	3 bln	39.619.000	3 bln	1.450.000	1 thn	41.069.000	1 thn	93,88%	62.219.000	22,54%	Set-DPRD	
							240.448.715.083	-	33.175.478.531	-	45.303.669.712	6.335.575.539	12.858.791.420	10.015.143.671	12.341.179.052	41.550.689.682	91,72%	74.726.168.213	31,08%							
<b>J U M L A H</b>							<b>719.131.590.514</b>	<b>-</b>	<b>101.994.383.285</b>	<b>-</b>	<b>119.436.651.373</b>	<b>16.350.256.587</b>	<b>28.584.164.695</b>	<b>24.882.339.624</b>	<b>30.476.322.455</b>	<b>111.607.759.447</b>	<b>93,45%</b>	<b>213.602.142.732</b>	<b>29,70%</b>							

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN, Perangkat Daerah

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memasuki Tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah tersusun pada Tahun 2019 dan kemudian dilakukan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Perubahan Tahun 2022-2024 berdasarkan adanya perubahan Nomenklatur yang tertuang dalam Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Maluku merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### 3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapannya dituangkan dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut

**Tabel 3.1**

**Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024**

Visi	Misi
<b><i>Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan</i></b>	1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.
	3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
	4. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
	5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

### 3.3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka ditetapkan Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2022-2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya	1. Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.	2. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai
3. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	3. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD	4. Terasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.

### 3.4 Strategi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 3.3

## Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	➤ <b>Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.</b>	1. <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></li> <li>• <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> <li>1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan</li> <li>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
2.	➤ <b>Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></li> <li>• <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Meubel</li> <li>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</li> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b></li> </ul>	<p>3 Pebyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bagunanan lainnya</p> <p>5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan lainnya</p>
	<p>➤ <b>Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b></li> </ul>	<p>1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</p> <p>2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Layanan Administrasi DPRD</b></li> </ul>	<p>1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</p>
	<p>➤ <b>Capaian kegiatan – kegiatan DPRD yang terfasilitasi</b></p>	<p>2. <b>Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b></li> </ul>	<p>1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p>2. Pembahasan Rancangan Perda</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b></li> </ul>	<p>1. Pembahasan KUA dan PPAS</p> <p>2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</p> <p>3. Pembahasan APBD</p> <p>4. Pembahasan Perubahan APBD</p> <p>5. Pembahasan Laporan Semester</p> <p>6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</li> <li>2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</li> <li>3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</li> <li>5. Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>6. Pengawasan Pengguna Anggaran</li> </ol>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi DPRD</li> <li>2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan</li> <li>3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</li> <li>4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</li> <li>5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</li> <li>6. Penyusunan Program Kerja DPRD</li> </ol>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kode Etik DPRD</li> <li>2. Pengawasan Kode Etik DPRD</li> </ol>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</li> <li>2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD</li> </ol>

### 3.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan adanya perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

**Tabel 3.4**

#### **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.	Jumlah surat-surat masuk dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan fungsinya	85%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	85%
3.	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	Jumlah kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	85%
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang Terlaksana	85%

### 3.6 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Maluku melaksanakan Program kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran murni sebesar . 119.280.849.759,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 34.366.549.740,- dan Belanja Langsung Rp 84.914.300.019,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 119.436.651.373,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp Rp. 34.282.181.200,- dan Belanja Langsung Rp 85.154.470.173,-.

### 3.7 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Tabel 3.5

#### Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 34.282.181.200,-	30,11%
Belanja Langsung	Rp. 85.154.470.173,-	69,89%
<i>Jumlah</i>	<b><i>Rp. 119.436.651.373,-</i></b>	<b><i>100%</i></b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

Tujuan Rencana Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Propinsi Maluku tahun 2024 adalah untuk mencapai hasil dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Propinsi Maluku.

##### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Komponen Listrik /penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan peralatan rumah tangga.
  - Penyediaan bahan logistik kantor.
  - Penyediaan bahan cetak dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.**
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.**
  - Penyediaan jasa surat masuk
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan pelayanan umum kantor.

**6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinaan Kendaraan Dinas Operesional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor dan bangunan Gedung kantor atau Bangunan lainnya.

**7. Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD.**

- Penyediaan Pakaian Dinas
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

**8. Layanan Administrasi DPRD**

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

**2) Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

**1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

- Penyusunan dan Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Pembahasan Rancangan PERDA

**2. Pembahasan Kebijakan Anggaran**

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan Perubahan APBD
- Pembahasan Laporan semesteran
- Pembahasan Pertanggung jawab APBD

**3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan P.emeriksaan Keuangan
- Pengawasan Pengguna Anggaran.

#### **4. Peningkatan Kapasitas DPRD**

- Orentasi DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program Kerja DPRD.

#### **5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.**

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
- Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD.
- Pelaksanaan Reses.

#### **6. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD**

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

#### **7. Fasilitasi Tugas DPRD**

- Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.

**Sekretariat DPRD mempunyai 2 Program, 15 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan**

Tabel. 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024  
PROVINSI MALUKU

URUSAN PEMERINTAH DAERAH : 04. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
SKPD : 04. 02 UNSUR SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	GUGUS PULAU	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2023(Rp.000,-)	Prakiraan Maju 2024 (Rp.000,-)	Ket.	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN WAJIB													
	SEKRETARIAT DPRD													
4	02	01									29.965.643.512	44.948.465.268		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih serta Mutu Layananan Publik											
	01	01	02								34.882.457.131			
				01							34.882.457.131			
4	02	01	05								621.760.000	932.640.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
4	02	01	05	10							621.760.000	932.640.000	Set-DPRD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan													
4	02	01	1.06								6.565.211.686	9.847.817.529		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4	02	01	1.06	01							413.718.003	620.577.005	Set-DPRD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
4	02	01	1.06	02								-	Set-DPRD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
4	02	01	1.06	03							2.434.500.000	3.651.750.000	Set-DPRD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
4	02	01	1.06	04							1.093.716.683	1.640.575.025	Set-DPRD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
4	02	01	1.06	05							830.692.000	1.246.038.000	Set-DPRD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan													
4	02	01	1.06	06							1.650.325.000	2.475.487.500	Set-DPRD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
4	02	01	1.06	09							142.260.000	213.390.000	Set-DPRD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
4	02	01	1.07								2.657.033.203	3.985.549.805		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
4	02	01	1.07	02								-	Set-DPRD	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
4	02	01	1.07	05							618.400.000	927.600.000	Set-DPRD	
	Pengadaan Mebel													
4	02	01	1.07	10							2.038.633.203	3.057.949.805	Set-DPRD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													9.947.284.325	14.920.926.488		
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Gugus VII		1 Tahun								134.500.000	201.750.000	Set-DPRD	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Gugus VII		1 Tahun								2.824.776.000	4.237.164.000	Set-DPRD	
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Gugus VII		1 Tahun								780.000.000	1.170.000.000	Set-DPRD	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Gugus VII		1 Tahun								6.208.008.325	9.312.012.488	Set-DPRD	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													7.046.354.298	10.569.531.447		
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Gugus VII		1 Tahun								2.026.017.600	3.039.026.400	Set-DPRD	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Gugus VII		5 Unit								1.772.890.000	2.659.335.000	Set-DPRD	
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Gugus VII		46 Unit								3.247.446.698	4.871.170.047	Set-DPRD	
4	02	02	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD													1.458.000.000	2.187.000.000		
4	02	02	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Gugus VII										943.000.000	1.414.500.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Gugus VII		135 org								515.000.000	772.500.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.16		Layanan Administrasi DPRD			Gugus VII										1.670.000.000	2.505.000.000		
4	02	02	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Gugus VII		1 Tahun								1.670.000.000	2.505.000.000	Set-DPRD	
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD													56.682.756.488	72.728.219.817		
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD													7.673.767.000	11.510.650.500		
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Gugus VII dan Jakarta		12 buah								1.302.483.000	1.953.724.500	Set-DPRD	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda			Gugus VII dan Jakarta		8 Dokmen								6.371.284.000	9.556.926.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Gugus VII		1 Tahun								3.271.112.590	1.508.964.000		
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS			Gugus VII		1 Tahun								283.553.000	425.329.500	Set-DPRD	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Gugus VII		1 Tahun								281.406.540	422.109.810	Set-DPRD	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD			Gugus VII		1 Tahun								1.312.446.000	1.968.669.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD			Gugus VII		1 Tahun								52.762.500	79.143.750	Set-DPRD	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester			Gugus VII		1 Tahun								188.444.550	282.666.825	Set-DPRD	
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Gugus VII		1 Tahun								1.152.500.000	1.728.750.000	Set-DPRD	

4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Gugus VII, Jakarta						7.100.795.620	1.752.983.400		
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	347.505.500	521.258.250	Set-DPRD	
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	331.431.640	497.147.460	Set-DPRD	
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	351.157.640	526.736.460	Set-DPRD	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	-			
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	333.550.300	500.325.450	Set-DPRD	
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Gugus VII, Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	256.846.540	385.269.810	Set-DPRD	
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Gugus I s/d XII dan Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	5.480.304.000	8.220.456.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									10.682.338.560	16.023.507.840		
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD			Gugus VII dan Jakarta	1 Tahun				1 Tahun	870.070.000	1.305.105.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	5.209.910.000	7.814.865.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	1.311.285.000	1.966.927.500	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	1.930.858.560	2.896.287.840	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	905.602.000	1.358.403.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	454.613.000	681.919.500	Set-DPRD	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									20.654.240.810	30.981.361.215		
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Gugus I s/d XII	1 Tahun				1 Tahun	5.659.800.000	8.489.700.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	182.420.810	273.631.215	Set-DPRD	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses			Gugus I s/d XII	1 Tahun				1 Tahun	14.812.020.000	22.218.030.000	Set-DPRD	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									384.145.500	576.218.250		
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	307.125.000	460.687.500	Set-DPRD	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	77.020.500	115.530.750	Set-DPRD	

4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD								6.916.356.408	10.374.534.612								
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Gugus VII dan Jakarta	90 Fr				90 Fr	6.872.858.000	10.309.287.000	Set-DPRD						
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Gugus VII	1 Tahun				1 Tahun	43.498.408	65.247.612	Set-DPRD						
<b>TOTAL :</b>													<b>J U M L A H</b>						<b>86.648.400.000</b>	<b>117.676.685.085</b>		

Atene, Februari 2024  
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU



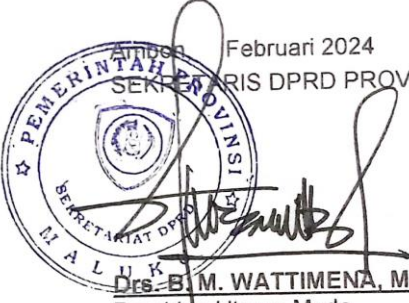
*[Handwritten Signature]*  
**Drs. B. M. WATTIMENA, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197505041993111002

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Tahun 2024 memuat program dan kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dengan harapan agar rencana kerja ini dapat memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi peningkatan dan pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian rencana kerja Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Tahun 2024 agar dapat dipergunakan seperlunya.

Amboi, Februari 2024  
Sekretaris DPRD PROVINSI MALUKU



**Drs. B. M. WATTIMENA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197505041993111002